

Eksplorasi Potensi Pariwisata Halal Hutan Mangrove Kota Langsa dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir

Aysya' Felayati¹, Muhammad Dayyan^{2*}, Nurjannah³

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa
Email: muhammad.dayyan@iainlangsa.ac.id

Abstract

This study explores the potential of halal tourism in mangrove forests in Langsa City as a strategic effort to increase the income of coastal communities. Mangrove forests in this area have unique ecosystems that support environmental sustainability as well as attractive tourism potential. The concept of halal tourism is applied to attract domestic and foreign Muslim tourists, with an emphasis on providing Muslim-friendly facilities, such as prayer areas, halal food, and tourist guides that are in accordance with Islamic values. This study was conducted using a qualitative descriptive approach using observation data, interviews with the tourism office, local communities/business actors, and tourists, as well as secondary data analysis. The results of this study indicate that halal tourism in mangrove forests can create new economic opportunities through the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), providing employment, and increasing public awareness of the importance of environmental conservation. This article recommends an integrated management strategy involving the Langsa City Government, Provincial Government, Central Government, coastal communities, Non-Governmental Organizations, Academics, Ulama, and the private sector to optimize the economic and ecological potential of this area in a sustainable halal manner that can attract both national and international tourists. So that it can increase the income of coastal communities in Langsa City.

Keywords: Halal tourism; Income increase; Coastal communities.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi potensi pariwisata halal hutan mangrove di Kota Langsa sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Hutan mangrove di kawasan ini memiliki keunikan ekosistem yang mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus potensi wisata yang berdaya tarik. Konsep pariwisata halal diterapkan untuk menarik wisatawan Muslim domestik maupun mancanegara, dengan penekanan pada penyediaan fasilitas ramah Muslim, seperti area ibadah, makanan halal, dan panduan wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data hasil observasi, wawancara dengan pihak dinas pariwisata, masyarakat local/pelaku usaha, dan wisatawan, serta analisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata halal hutan mangrove mampu menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Artikel ini merekomendasikan strategi pengelolaan terpadu yang melibatkan Pemerintah Kota Langsa, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Ulama, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan ekologi kawasan ini secara berkelanjutan halal yang dapat menarik wisatawan baik nasional dan internasional. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir Kota Langsa.

Kata Kunci: Pariwisata halal, Peningkatan pendapatan, Masyarakat pesisir.

A. PENDAHULUAN

Kota Langsa, yang terletak di pesisir Timur Aceh, memiliki sumber daya alam yang sangat berharga, salah satunya adalah hutan mangrove yang memiliki luas sekitar 8.000 hektare dan salah satu terbesar di Asia Tenggara (Saputra, 2022). Hutan mangrove ini tidak hanya penting secara ekologis untuk menjaga

* Corresponding author

Received: November 30, 2024; Revised: February 17, 2025; Accepted: February 18, 2025

kestabilan ekosistem pesisir, mencegah erosi, dan menjadi tempat hidup bagi berbagai spesies, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai objek ekowisata alam yang menarik (Wardhani, 2011). Keindahan alam hutan mangrove Kota Langsa memiliki berbagai keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pariwisata menjadi kebutuhan masyarakat dan gaya hidup yang terus berkembang secara universal baik masa sekarang dan di masa depan (Aji et al., 2020). Sektor pariwisata secara global semakin meningkat yang berbasis syariah atau sering disebut dengan wisata halal (Hakim et al., 2017). Jenis wisata halal merupakan bagian wisata yang memberikan fasilitas yang memenuhi kebutuhan pokok wisatawan muslim sesuai dengan ketentuan Islam (Noviantoro & Zurohman, 2020). Fenomena meningkatnya kegemaran masyarakat terhadap pariwisata berbasis syariah seiring meningkatnya jumlah umat Islam di dunia dan perhatian umat Islam terhadap pariwisata berlabel halal (Krisna et al., 2023). Indonesia ikut ambil bagian sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia yang bisa dinikmati oleh wisatawan bukan hanya muslim, karena hakikat pusat wisata halal bersifat inklusif yang terdiri dari restoran halal, hotel syariah, serta makanan dan minuman yang berlabel halal sehingga dapat dinikmati oleh semua orang (Pelu et al., 2020).

Kini setiap kabupaten/kota di Indonesia berusaha menciptakan kawasan industri pariwisata sebagai salah satu sektor penting untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (Sihombing & Hutagalung, 2021). Salah satu sektor pariwisata yang dikembangkan oleh masing-masing daerah adalah ekowisata yang mengedepankan budaya dan nilai-nilai Islam yang lebih dikenal dengan pariwisata halal sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan daya tarik wisatawan (Rozalinda et al., 2019). Sebelumnya wisata syariah lebih dikenal sebagai wisata religi yaitu menunaikan ibadah haji atau umroh, mengunjungi masjid-masjid bersejarah, mengunjungi makam (ziarah), dan lain sebagainya (Hakim et al., 2017). Kini pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata yang memadukan wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam (Pelu et al., 2020). Pengembangan wisata halal adalah satu aspek pembangunan yang sejalan dengan maqashid syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap agama (keimanan), jiwa (kehidupan), akal (pendidikan), keturunan (generasi), dan harta benda (Dayyan & Mohammed, 2014). Terwujudnya maqashid syariah pada pariwisata halal di Indonesia hanya dapat dicapai jika semua pelaku dalam berbagai unsur pariwisata halal seperti destinasi wisata, layanan, infrastruktur, regulasi pemerintah saling bahu-membahu mewujudkan ketentuan syariah karena maqashid syariah hanya akan dapat dicapai jika penerapan syariah dalam pariwisata halal dilakukan (Al Farisi, 2022).

Untuk mendukung implementasi pariwisata halal tersebut DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Standar Syariah. Pengembangan pariwisata halal di Indonesia dan Aceh khususnya dapat juga mengadopsi konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) sebagai model pengembangan pariwisata yang menekankan pada peran atau partisipasi aktif masyarakat (Permatasari, 2022). Aceh yang dijuluki sebagai serambi Mekkah memiliki budaya Islam yang cukup kental dan kuat dibandingkan daerah lain. Aceh menegaskan dirinya sebagai provinsi yang menerapkan sistem kehidupan berbasis syariah yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle) masyarakatnya sehari-hari. Kementerian Pariwisata menargetkan Aceh sebagai destinasi wisata halal (halal tourism) untuk menarik wisatawan muslim dunia (Satriana & Faridah, 2018).

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dari aspek ekonomi dan sosial dapat memberikan manfaat dan dampak positif, seperti terciptanya lapangan pekerjaan, adanya pendapatan baru bagi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kebanggaan pada komunitas, dan kesetiaan

masyarakat untuk terlibat dalam tiap kegiatan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan (Utami et al., 2022). Masyarakat pesisir Kota Langsa, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan atau petani tambak ikan/udang, sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang terbatas, dengan sedikitnya alternatif pendapatan selain dari sektor perikanan dan kelautan. Pengembangan potensi hutan mangrove sebagai destinasi pariwisata halal dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Maka pariwisata halal hutan mangrove Kota Langsa yang berbasis alam, selain memberikan peluang usaha baru seperti homestay, jasa pemandu wisata, dan kuliner halal, juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk setempat.

Penelitian ini akan mendiskusikan apa saja potensi yang dapat dieksplorasi dan dikembangkan pada hutan mangrove Kota Langsa sehingga menjadi salah satu destinasi pariwisata halal yang menarik dan berkelanjutan bagi wisatawan dunia. Kajian ini penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dan pasar wisata halal, serta tantangan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi hutan mangrove Kota Langsa dalam pengembangan pariwisata halal yang dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, serta untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan mangrove Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang dipilih dengan tiga kriteria: (1) menduduki jabatan pada pemerintah Kota Langsa yang berkaitan dengan pariwisata; (2) bertempat tinggal di sekitar hutan mangrove; dan (3) masyarakat yang mengetahui keadaan sekitar wisata halal di kawasan wisata hutan mangrove Kota Langsa. Selanjutnya kajian ini menggunakan sumber data sekunder dari sejumlah literatur berupa buku, artikel jurnal, dan berita di media masa kemudian di analisis dengan pendekatan kualitatif diskriptif yang diuraikan dalam bentuk narasi.

C. HASIL DAN ANALISIS

Pariwisata Halal Hutan Mangrove Kota Langsa

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu *pari* yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Dan kata *wisata* berarti perjalanan, berpergian yang memiliki kesamaan dengan kata *trave*. Pariwisata sesungguhnya bukanlah berarti “*tourisme*” (bahasa belanda) atau “*tourism*” (bahasa inggris), melainkan pariwisata sinonim dengan pengertian “*tour*”. pelaksanaan kegiatan wisatawan (wisata), yaitu kepentingan mengubah tempat tinggal sehari-hari seseorang untuk sementara waktu selain untuk melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan atau upah (Pelu et al., 2020). Maka pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputat-putar, dari suatu tempat ke tempat lain.

Kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu *halla* yang memiliki arti tidak terikat atau lepas. Selanjutnya halal diterjemahkan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau digunakan dalam Islam. Indonesia makan halal harus mendapat label halal yang ditempel pada kemasan pangan sebagai bentuk informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal, dalam hal ini telah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (Kristiane, 2021). Maka barang yang bertanda halal menunjukkan boleh dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam.

Pariwisata halal mengacu pada konsep pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mencakup aspek-aspek seperti kebersihan, keamanan, fasilitas halal (makanan, akomodasi, dan layanan lainnya), serta nilai-nilai sosial yang diterima oleh wisatawan Muslim (Satriana & Faridah, 2018). Pariwisata halal juga seringkali melibatkan wisata alam yang menawarkan pengalaman spiritual dan harmoni dengan alam. Pariwisata halal yang secara alamiah menyinggung keyakinan dan adat istiadat agama Islam, merupakan sektor pariwisata yang menawarkan layanan bagi wisatawan Muslim. Sebab, pengembangan kegiatan pariwisata dilandasi oleh cita-cita Islam yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh umat Islam (Apridia & Dahruji, 2022). Pariwisata halal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan syariat Islam baik dari segi penyediaan makanan dan minuman halal, hotel syariah, pakaian syar'i dan hal yang terkait pariwisata halal lainnya. Menurut Fatwa DSN MUI tahun 2016 ada delapan kriteria pariwisata syariah yaitu: 1) Fokus pada kebaikan/kemaslahatan masyarakat. 2) Berupaya untuk menciptakan ketenangan, pencerahan, dan penyegaran wisatawan. 3) Menjauhi kemusyrikan khurafat. 4) Menjauhi aktivitas asusila termasuk perzinahan, perjudian, alkohol, narkoba, dan perilaku pornografi. 5) Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan. 6) Bersifat global dan inklusif. 7) Menjaga kelestarian lingkungan. 8) Menghormati kearifan lokal dan norma sosial budaya (DSN-MUI, 2016).

Kota Langsa memiliki beberapa objek wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan di antaranya hutan mangrove, taman bambu runcing metropolis Langsa, bangunan balee juang sebagai meuseum, hutan lindung Langsa, Pulau Teulaga Tujoh, Pantai Pasir Putih Langsa, Mutiara Waterpark Langsa. Dari sejumlah destinasi wisata Kota Langsa yang terkenal adalah wisata hutan mangrove yang berhasil memenangkan dua penghargaan dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) 2019 kategori ekowisata terpopuler Mangrove Forest Park atau taman hutan bakau dan juara sebagai Most Favourit Tourism 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Said, 2019). Hutan mangrove Kota Langsa juga telah memiliki menara pandang *Mangrove Forest Park* yang terdiri dari 7 tingkat dengan ketinggian 46 meter dan jadi bangunan tertinggi di Kota Langsa, sehingga menjadi salah satu ikon pariwisata Kota Langsa (Zubir, 2024), sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Menara Pandang Mangrove Forest Park

Sumber: Foto Abdul Hadi/aceh kini

Hutan Mangrove Kota Langsa yang memiliki peluang yang unik sebagai salah satu destinasi wisata halal di Provinsi Aceh dengan memadukan pelestarian ekologi. Potensi tersebut juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan wisata halal sebagaimana dijelaskan oleh kepala dinas pariwisata Kota Langsa bahwa:

“Kami melihat hutan mangrove ini memiliki daya tarik yang unik seperti keindahan pohon mangrove yang menyejukkan mata. Selain itu, menjadi wisata edukasi bagi seseorang yang ingin mengetahui tentang flora dan fauna yang ada di hutan mangrove. Kami sebagai pemerintah pun, terus melakukan pengembangan objek wisata seperti pembangunan tower mangrove forest park Langsa. Oleh sebab itu, pemkot Langsa meresmikan dan mengembangkan hutan mangrove serta mempromosikannya agar terkenal keseluruh dunia”.

Hutan mangrove Kota Langsa sebagai objek wisata alam sangat selaras dengan prinsip-prinsip tersebut karena perannya dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut kerap kali tertarik tidak hanya pada keindahan alamnya, tetapi juga oleh narasi etika syariah dan ramah lingkungan, yang meningkatkan daya tarik Langsa sebagai pusat wisata halal. Sebagaimana disampaikan salah satu wisatawan bahwa:

“Saya kesini karena suka melihat laut dan pemandangan yang hijau. Selain itu, saya juga datang untuk menikmati udara sore sambil bersantai dengan keramahan masyarakat yang Islami”.

Dari dua pernyataan tersebut menunjukkan potensi pariwisata mangrove Kota Langsa untuk tumbuh menjadi tujuan wisata populer sebagai ekowisata. Potensi alam hayati ekosistem mangrove dengan berbagai jenis flora dan fauna untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata halal. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa keindahan, serta keberadaan hutan mangrove yang masih alami merupakan potensi penting untuk menarik minat wisatawan melakukan wisata alam yang ramah lingkungan (Wardhani, 2011). Penelitian Xaba et al. (2024) menunjukkan bahwa ekowisata memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di masyarakat pedesaan sesuai dengan dimensi tujuan pembangunan berkelanjutan. Keunikan dan kealamiahannya hutan mangrove Kota Langsa tepat untuk dieksplorasi dan dikembangkan sebagai salah satu destinasi ekowisata halal Indonesia.

Ekowisata halal hutan mangrove di Kota Langsa dapat juga dikembangkan sebagai eduwisata dengan menyelenggarakan kegiatan edukatif yang mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ajaran Islam tentang tanggung jawab terhadap alam. Misalnya, pengunjung dapat mengikuti tour yang mengedukasi mereka mengenai fungsi hutan mangrove dalam ekosistem, serta bagaimana Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan alam (Pusvisasari, 2020). Menurut kajian Hayati (2017) kegiatan eduwisata dilakukan dengan pendekatan saintifik dan mencakup tiga topik yaitu keanekaragaman biota laut, ekosistem terumbu karang, dan kelautan. Maka hutan mangrove menjadi salah satu potensi eduwisata yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar sehingga pariwisata dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Para wisatawan akan mendapatkan pengalaman edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan fungsi hutan mangrove dalam mencegah abrasi serta sebagai habitat satwa.

Salah satu tujuan Islam mendorong umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras,

mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang khaliq (Pusvisasari, 2020). Pariwisata halal dengan pendekatan ekowisata dan eduwisata menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi wisatawan muslim agar kegiatan wisata terasa nyaman dan aman sekaligus mendapatkan wawasan terkait ekosistem pesisir.

Hutan mangrove Langsa juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir secara signifikan. Dengan mendiversifikasi sumber pendapatan, mengurangi ketergantungan pada penangkapan ikan tradisional, dan menciptakan lapangan kerja, pariwisata halal dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Masyarakat sekitar hutan mangrove dapat memanfaatkan peluang dari wisata hutan mangrove dengan membuka usaha seperti berjualan makanan khas daerah pesisir yaitu kuliner seafood, sate dondong, mie udang/kepiting, bakso ikan, dan minuman dingin yang menyegarkan. Hal tersebut dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan dalam bentuk sajian makanan dan minuman halal dan berbagai peluang ekonomi kreatif sebagai salah satu potensi pariwisata pesisir Kota Langsa. Potensi pariwisata hutan mangrove dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat melalui pengembangan ekowisata dan eduwisata. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat:

“Destinasi wisata hutan mangrove telah dimulai sejak tahun 2014 yang memiliki potensi eduwisata dan ekowisata alam, wisata karbon sebagai daya tarik untuk berkunjung ke tempat tersebut. Pemerintah daerah telah melakukan pembangunan jalan hutan mangrove yang telah meningkatkan pendapatan asli daerah. Serta memberi efek terhadap masyarakat sekitar hutan mangrove, seperti terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir atau munculnya usaha-usaha kecil di sekitar hutan mangrove”.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa potensi ekowisata dan eduwisata hutan mangrove Kota Langsa menjadi salah satu pilihan untuk ikut mempromosikan kelestarian lingkungan yang ikut berkontribusi bagi kebutuhan karbon dunia untuk menjaga keasliannya sekaligus menjadi suatu kawasan kunjungan wisata. Maka ekowisata hutan mangrove merupakan salah satu alternatif program yang dapat diterapkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan ekosistem mangrove (Wardhani, 2011). Pariwisata menjadi prioritas pemerintah karena menjadi lokomotif pergerakan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, diharapkan perubahan regulasi perizinan dan pengelolaan pariwisata masih dapat dilakukan. Perubahan tersebut harus didasarkan pada kebutuhan pengembangan pariwisata daerah. Menyeimbangkan hak dan kewajiban pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menghilangkan regulasi yang merugikan pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah. Penekanan pada kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk mendukung agenda keberlanjutan pariwisata (Suastuti et al., 2024).

Peran penting masyarakat pesisir dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata halal berbasis hutan mangrove memiliki pengetahuan lokal yang berharga terkait ekosistem mangrove dan potensi wisata alam yang ada. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata, mereka tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga dapat menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Kajian Permatasari (2022) memperkuat bahwa pengembangan wisata berbasis masyarakat akan memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan sehingga menciptakan keadilan distribusi melalui terpenuhinya pekerjaan yang stabil dan peluang memperoleh pendapatan serta layanan sosial bagi masyarakat setempat, dan berkontribusi pada

pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan seperti pemandu wisata, pengelolaan homestay, dan penyediaan produk lokal halal yang dapat dijual kepada wisatawan, akan membuka banyak peluang ekonomi baru. Dengan demikian, masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat langsung dari pariwisata halal, seperti melalui jasa pemanduan wisata, penyediaan produk lokal (misalnya makanan halal, kerajinan tangan), serta peluang kerja di sektor akomodasi dan transportasi. Hal ini tentunya dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan yang rentan terhadap perubahan cuaca atau penurunan hasil tangkapan.

Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Langsa dapat mendorong pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas kesehatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dengan demikian, pariwisata halal hutan mangrove tidak hanya meningkatkan pendapatan langsung bagi masyarakat, tetapi juga membawa dampak positif terhadap pembangunan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Tantangan Pengembangan Wisata Halal Hutan Mangrove Kota Langsa

Meskipun potensi hutan mangrove Kota Langsa sangat besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan pariwisata halal. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur pendukung, seperti akomodasi yang ramah wisatawan Muslim, fasilitas transportasi yang memadai, dan pelatihan bagi masyarakat lokal dalam mengelola pariwisata. Selain itu, pemahaman mengenai konsep pariwisata halal di kalangan pengelola wisata dan masyarakat juga masih terbatas, yang menghambat optimalisasi potensi yang ada.

Tantangan lainnya adalah keberlanjutan pengelolaan lingkungan. Hutan mangrove harus dikelola dengan hati-hati agar tetap terjaga kelestariannya, mengingat potensi kerusakan yang dapat terjadi akibat peningkatan aktivitas wisata yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan tentang pengelolaan lingkungan dan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan kepada masyarakat pesisir dan pengelola pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian Pasarela et al. (2022) ada sejumlah kendala pengembangan wisata halal diantaranya adalah belum siapnya sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman mendalam para pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap konsep pengembangan wisata halal, peran serta masyarakat, minimnya inovasi dalam program promosi dan fasilitas yang belum memadai. Sementara itu, kendala yang dihadapi adalah belum adanya regulasi terkait pengembangan wisata halal di Indonesia dan belum adanya sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan kajian Huda et al. (2021) Pengembangan wisata halal di Aceh masih terkendala dengan aturan pelaksanaan pariwisata halal di Aceh belum sampai ke masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi, komunikasi, dan upaya promosi yang masif oleh pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Dengan menerapkan sinergi fungsional antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat lokal di Aceh, tujuan pariwisata halal dapat terwujud.

Disamping itu pengembangan pariwisata membutuhkan penerapan inovasi terbuka yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal dalam pembangkitan gagasan dan pengembangan pariwisata yang masih relatif terbatas (Pillmayer & Naumov, 2024). Dalam pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan terdapat dampak positif dan dampak negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan alam. Oleh karena itu, dalam pembangunan sektor kepariwisataan harus memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup mengingat salah satu unsur wisata adalah sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata itu sendiri pada masa yang akan datang (Sudini & Arthanaya, 2022). Kajian Milano et al. (2024) menyebutkan bahwa meningkatnya politisasi pariwisata sebagai dimensi vital dalam studi perkotaan

telah berdampak pada struktur sosial ekonomi perkotaan yang membuka jalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial dalam lingkungan perkotaan yang bergantung pada pariwisata, dan perlu evaluasi ulang pariwisata sebagai objek kebijakan,

Strategi Pemerintah Pariwisata Kota Langsa Terhadap Wisata Hutan Mangrove

Keberhasilan pengembangan pariwisata halal berbasis hutan mangrove juga sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap kebijakan pengembangan pariwisata, khususnya yang berbasis pada pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Fasilitas pendukung seperti promosi pariwisata halal, pelatihan bagi pengusaha lokal, serta dukungan dalam pengelolaan lingkungan harus menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata di Kota Langsa.

Pemerintah juga harus memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap hutan mangrove agar ekosistemnya tetap terjaga sambil memfasilitasi pertumbuhan sektor pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan adalah dengan meningkatkan daya tarik, aksesibilitas, keamanan, fasilitas umum, dan kinerja pemerintah daerah dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat (Kurniawan et al., 2023). Pemerintah Kota Langsa telah berupaya mengembangkan wisata hutan mangrove dengan menyediakan mushala tempat untuk beribadah. Menyediakan toilet terpisah antara pria dan wanita. Membangun restoran dan warung makan atau lapak jualan yang menyajikan makanan halal. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan diperlukan beberapa strategi.

Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan sehingga minat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata hutan mangrove kota Langsa. Seperti menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang wisata halal di hutan mangrove. Memberikan pelatihan kepada pemandu wisata dan staf tentang pariwisata halal. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Menyelenggarakan kegiatan dan acara yang ramah keluarga dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kualitas layanan jika dievaluasi dengan menggunakan kriteria GMTI (*Global Muslim Travel Index*), diperlukan penguatan pada empat hal yaitu akses atau kenyamanan (*accessibilities*), komunikasi (*communication*), lingkungan (*environment*), dan pelayanan (*service*), pariwisata halal bisa tumbuh dari potensi yang terdapat pada destinasi wisata hutan mangrove.

Salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kesenangan pengunjung terhadap suatu situs adalah aksesibilitas. Aksesibilitas, kenyamanan dimulai dari kondisi jalan, aksesibilitas roda, ketersediaan jalur perjalanan, dan tempat parkir yang memadai. Minat wisatawan untuk mengunjungi suatu situs meningkat seiring dengan tingkat akses yang ditawarkan atau disediakan. Oleh karena itu diperlukan strategi atau rencana untuk mengembangkan wisata halal sesuai dengan persyaratan GMTI, maka disediakan akses di lokasi wisata hutan mangrove Kota Langsa.

Komunikasi berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan inisiatif pemasaran. Memilih strategi komunikasi sangat penting untuk keberhasilan upaya komunikasi yang sukses. Sebaliknya, pendekatan komunikasi yang buruk tentu akan mempersulit komunikasi atau penyampaian pesan kepada orang lain. Strategi komunikasi pemasaran diperlukan bagi industri pariwisata agar dapat menarik wisatawan untuk datang ke suatu destinasi. Pemasaran pariwisata masih dilakukan melalui berbagai media cetak dan digital.

Tentu saja wisatawan akan memilih destinasi wisata yang menawarkan rasa nyaman dan aman. Oleh karena itu, kebersihan, kenyamanan, keramahan, keamanan, dan kelestarian lingkungan menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha pariwisata. Hasilnya, wisatawan akan merasa lebih percaya diri

dan percaya dalam memilih destinasi wisata. Perubahan yang harus dilakukan antara lain adalah meningkatkan kesadaran wisatawan dan pengelola akan perlunya menjaga lingkungan dan ekologi di destinasi wisata serta menerapkan sanksi berat bagi pihak yang merusaknya.

Penyediaan layanan yang memenuhi permintaan wisatawan Muslim merupakan ide di balik pengembangan pariwisata halal. Kemampuan mengamalkan agama di destinasi wisata sangat penting bagi pengunjung muslim. Agen perjalanan mempunyai tugas untuk mengakomodasi kebutuhan mendasar pengunjung Muslim. Dalam konteks ini, "layanan" dapat mencakup apa saja mulai dari masakan halal hingga ruang salat, layanan Ramadhan, toilet, kurangnya aktivitas non-halal, dan peluang rekreasi pribadi.

Hal ini terlihat dari kedua lokasi wisata tersebut yang dari segi pelayanan memenuhi syarat pertumbuhan wisata halal. Pelaku usaha juga memiliki peran penting dari segi layanan untuk membuat pengunjung nyaman dan aman dalam berwisata sehingga wisatawan akan kembali berkunjung ke wisata hutan mangrove.

Kedua, promosi dan pemasaran. Dinas pariwisata senantiasa gencar melakukan promosi wisata halal hutan mangrove. Seperti mengikuti pameran wisata halal di dalam dan luar negeri. Bekerjasama dengan agen perjalanan wisata halal. Memanfaatkan media sosial dan platform online lainnya untuk mempromosikan wisata halal di hutan mangrove. Mengembangkan materi promosi yang menarik bagi wisatawan halal. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan wisatawan mengunjungi hutan mangrove.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal tentang bagaimana melayani wisatawan halal. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata halal di hutan mangrove akan menciptakan *multiflyer effect*. Menurut kajian Andini et al. (2024) pelibatan masyarakat dapat dilakukan dengan memberi pelatihan secara rutin tentang manajemen pariwisata, keramah tamahan, dan layanan pelanggan akan memberikan pengalaman positif kepada pengunjung dan bahwa masyarakat memiliki keterampilan menangani para wisatawan. Pelatihan juga akan membekali masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui wisata halal.

Pariwisata harus dikembangkan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Menurut Siswanto dan Moeljadi (2015) pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan ekowisata adalah sebagai berikut: a). Karena sumber daya alam dan budaya yang dimanfaatkan sebagai pengembangan ekowisata, secara tradisional dikuasai dan dikelola oleh masyarakat setempat (*local resource*); b). Masyarakat setempat mempunyai tanggung jawab setempat (*local accountability*) karena kegiatan mereka secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka; c). Adanya variasi antar daerah (*local variety*) sehingga desa yang satu dengan desa yang lain tidak boleh diperlakukan sama, karena mempunyai sistem pengelolaan yang berbeda sesuai potensinya; d). Masyarakat setempat merasa memiliki atas sumber daya alam yang ada, sehingga akan tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan; e). Dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan ekowisata melalui penyuluhan maka akan membantu masyarakat setempat dalam penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup mereka sehingga tidak akan ada lagi ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang mengakibatkan terganggunya kawasan hutan mangrove sebagai akibat penebangan liar, pencurian hewan, flora dan hasil hutan lainnya.

Dalam konteks hutan mangrove, pariwisata halal yang berkelanjutan akan mempertimbangkan pelestarian ekosistem mangrove serta kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam untuk pariwisata dan pelestarian lingkungan. Kajian Lemy et al., (2019) proses pengembangan pariwisata berkelanjutan harus mencakup pemberian keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan sumber daya pariwisata secara bijaksana. Kegiatan tersebut dapat mencakup pelatihan dan lokakarya untuk membangun kapasitas dan melatih para pelatih. Lebih jauh, masyarakat juga harus diberdayakan agar dapat secara efektif

menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan pada destinasi hutan mangrove Kota Langsa. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjuk fasilitator dan mitra lokal untuk menciptakan kelompok orang-orang yang terampil dan berpengetahuan sehingga dapat mempercepat penerapan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Langsa.

Penguatan kelembagaan pariwisata mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata menuju kawasan strategis pariwisata yang didukung oleh peran serta masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta. Selain itu, keberadaan kelompok sadar wisata di desa tidak kalah penting dalam pengembangan desa wisata karena peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata dimulai dari keberadaan kelompok sadar wisata mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam kegiatan usaha desa wisata (Arintoko et al., 2020).

Berdasarkan kajian Rahmatika dan Suman (2020) untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata halal Pemerintah Daerah perlu membangun sistem kelembagaan yang mendukung sertifikasi halal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh sarana penunjang di lokasi wisata halal sesuai dengan syariat Islam dan bersertifikat halal. Kemudian perlu terus mengembangkan program pelatihan untuk menjaga keamanan wisatawan merupakan hal yang penting. Pelatihan pemandu wisata sesuai dengan standar syariah Islam juga diperlukan untuk melengkapi fasilitas syariah.

D. SIMPULAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa hutan mangrove Kota Langsa memiliki potensi secara ekowisata dalam bentuk pelestarian hutan yang berfungsi menciptakan keseimbangan alam dan menjaga ketahanan pesisir dari kerusakan lingkungan. Kedua, hutan mangrove memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi eduwisata yang menawarkan wawasan tentang ekologi hutan mangrove kepada para wisatawan. Pengembangan ekowisata hutan mangrove tidak hanya dapat mengantisipasi terjadinya kerusakan ekosistem mangrove, namun juga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dengan berbagai peluang usaha ekonomi kreatif.

Dengan mengeksplorasi potensi ekowisata dan eduwisata pengembangan wisata halal hutan mangrove akan memberikan dampak pada keadilan distribusi ekonomi masyarakat pesisir. Dua potensi besar tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir tatkala masyarakat diberdayakan melalui pelatihan keterampilan seperti pemandu wisata, pengelolaan homestay, dan penyediaan produk lokal halal yang dijual kepada wisatawan. Hal ini tentunya dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan yang rentan terhadap perubahan cuaca atau penurunan hasil tangkapan.

Pemerintah Kota Langsa perlu melakukan strategi utama yaitu melengkapi berbagai fasilitas infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, promosi dan pemasaran secara digital, pengembangan produk wisata halal berbasis masyarakat melalui ekonomi kreatif. Seluruh stakeholder (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, tokoh agama) perlu berkolaborasi dalam mengelola hutan mangrove Kota Langsa. Semakin baik eksplorasi dan berkembang wisata hutan mangrove, maka semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung semakin berpotensi untuk mendapatkan pendapatan baik bagi pemerintah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat pendapatan masyarakat pesisir Kota Langsa.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, H. M., Muslichah, I., & Seftyono, C. (2021). The determinants of Muslim travellers' intention to visit non-Islamic countries: a halal tourism implication. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1553-1576. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0075>
- Al Farisi, M. S. (2022). Konsep Pariwisata Halal di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah. Perbanas *Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 84–90. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i1.27>
- Andini, C., Nugraha, A., & Novianti, E. (2024). Pengembangan Potensi Destinasi Wisata Kuliner Berbasis Masyarakat Di Desa Pengujan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, 4(1), 67–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.34013/mp.v5i1.1510>
- Apridia, M., & Dahruji. (2022). Analisis Potensi Destinasi Wisata Halal di Daerah Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan (Kecamatan Kamal, Labang Dan Kwanyar). *Prosiding Nasional "Perspektif Digitalisasi, Ekonomi, Dan Bisnis Pasca Pandemi,"* 87–100.
- Arintoko, A., Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi, S. (2020). Community-Based Tourism Village Development Strategies: A Case of Borobudur Tourism Village Area, Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 29(2), 398–413. <https://doi.org/10.30892/gtg.29202-477>
- Dayyan, M., & Mohammed, M. O. (2014). Public Perception on Government Spending in Aceh: An Analysis Based on Maqasid Performance Pairwise Matrix (MPPM). *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 102–124. <https://doi.org/10.22373/share.v3i2.1344>
- DSN-MUI. (2016). *Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Hakim, A. A., Ridwan, H., Hasanuddin, M., & Al-Hakim, S. (2017). Towards Indonesia Halal Tourism. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2), 279–300. <https://doi.org/10.15408/AJIS.V17I2.6243>
- Hayati, R. S. (2017). Edutourism Taka Bonerate National Park through Scientific Approach to Improve Student Learning Outcomes. *Journal of Physics: Conference Series*, 812, 1–7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/812/1/012023>
- Huda, N., Rini, N., Muslikh, M., & Hidayat, S. (2021). Developing a Strategic Model for Halal Tourism in Aceh. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 9(1), 70–82. <https://arrow.tudublin.ie/ijrtp/vol9/iss1/7/>
- Krisna, R., Yusuf, M., & Putra, E. (2023). Analysis of the Halal Ecosystem and Halal Literacy on the Development of Islamic Economic Halal Regulation. *Proceeding of The International Conference on Business and Economics*, 1(1), 318–336. <https://doi.org/10.56444/icbeuntagsmg.v1i1.664>
- Kristiane, D. (2021). Labelisasi Halal dan Haram. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 59–74. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.21>
- Kurniawan, C., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., & Fadhlurrohman, M. I. (2023). Sustainable tourism development strategy in West Nusa Tenggara province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1129(1), 012–022. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1129/1/012022>
- Lemy, D. M., Teguh, F., & Pramezwary, A. (2019). Tourism Development in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(6), 91–108. <https://doi.org/10.1108/S2042-144320190000011009>
- Milano, C., Koens, K., & Russo, A. P. (2024). The politics of urban tourism (im)mobilities: Critical perspectives on inequalities and social justice. *Cities*, 152, 105148. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105148>
- Noviantoro, K. M., & Zurohman, A. (2020). Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 275. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8160>

- Pasarela, H., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Halal Tourism Development Strategy in Indonesia. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 9(1), 14–26. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v9i1.188>
- Pelu, I. E. A., Kurniawan, R., & Akbar, W. (2020). *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah* (A. Dakhoir (ed.)). K-Media.
- Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali. *KERTHA WICAKSANA*, 16(2), 164–171. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.164-171>
- Pillmayer, M., & Naumov, N. (2024). Open Innovation in Tourism. In *Reference Module in Social Sciences*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-13701-3.00251-6>
- Pusvisasari, L. (2020). Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Pariwisata Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(1), 39–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5642>
- Rahmatika, M. F., & Suman, A. (2020). Improving the Economy of Local Communities Through Innovation of the Potential of Shariah-Based Natural Tourism in East Java. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 8(4), 72–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.21427/jcs8-5q77>
- Rozalinda, R., Nurhasnah, N., & Ramadhan, S. (2019). Industri Wisata Halal di Sumatera Barat: Potensi, Peluang Dan Tantangan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.488>
- Said, M. (2019). *Langsa Raih Juara I di API 2019 Melalui Ekowisata Taman Hutan Bakau*. Antara News. Diakses dari: <https://aceh.antaranews.com/berita/109463/langsa-raih-juara-i-di-api-2019-melalui-ekowisata-taman-hutan-bakau>
- Saputra, E. D. (2022). *Hutan Mangrove Langsa, Objek Wisata Kelas Dunia – Aceh*. Tourism Travel. Cahaya Aceh. Diakses dari: <https://acehtourism.travel/langsa/04/2022/hutan-mangrove-langsa-objek-wisata-kelas-dunia/>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal tourism: development, chance and challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Sihombing, N. E., & Hutagalung, I. J. (2021). Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Toba Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 150–172. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.415>
- Siswanto, A., & Moeljadi, M. (2015). Eco-Tourism Development Strategy Baluran National Park in the Regency of Situbondo, East Java, Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 4(4), 185–195. <https://doi.org/10.11591/ijere.v4i4.4510>
- Suastuti, E., Haq, H. ul, Muishot, G., Sri Djamiati, T., & Arif, F. (2024). Reconstruction of The Policy License for Tourism Businesses: Challenge and Opportunity for Social Welfare. *BESTUUR*, 12(1), 82–103. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i1.80277>
- Sudini, L. P., & Arthanaya, I. W. (2022). Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 65–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.5837>
- Utami, V. Y., M. Yusuf, S. Y., & Mashuri, J. (2022). Penerapan Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat. *JCOMENT: Journal of Community Empowerment*, 3(3), 219–226. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.286>
- Wardhani, M. K. (2011). Kawasan Konservasi Mangrove: Suatu Potensi Ekowisata. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 4(11), 60–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/jk.v4i1.891>

- Xaba, F., Adanlawo, E. F., & Nkomo, N. Y. (2024). The Role of Ecotourism in Reducing Poverty and Unemployment: A Mixed Method Approach. *E-Journal of Tourism*, 11(1), 93–108. <https://doi.org/10.24922/eot.v11i1.114082>
- Zubir. (2024). *Mangrove Forest Park Kuala Langsa Objek Wisata Mendunia, Terluas di Asia Tenggara*. SerambiNews.Com. Diakses dari: <https://aceh.tribunnews.com/2024/10/04/mangrove-forest-park-kuala-langsa-objek-wisata-mendunia-terluas-di-asia-tenggara>
- .